

**Analisis Kritis Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan: Studi Kasus Desa  
Karangrejo Kecamatan Borobudur**

Farhan Riski Tricahyo, Laila Kholid Alfirdaus

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Semarang. Kode Pos 50275

Telepon/Faksimile: (024) 74605407

Laman: [www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAK**

Partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dan indikator keberhasilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat dalam suatu program sebagai keharusan yang diawali dengan sebuah proses perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Berbagai permasalahan partisipasi masyarakat sering ditemui pada saat proses sedang berjalan. Dengan demikian penelitian ini membahas dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis menjelaskan dinamika partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo. Indikator permasalahan partisipasi masyarakat seperti *groupthink* dan *free rider*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara terstruktur dan teknik dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Terdapat hasil bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan masyarakat mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh desa serta kendala yang menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan beberapa program pelatihan maupun pembangunan desa. Dalam permasalahan *groupthink* sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta bekerjasama dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, *free rider* tidak terdapat adanya masalah tersebut yang terjadi dalam partisipasi masyarakat.

Penelitian ini kepala desa dan jajarannya saling menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, masyarakat tetap menjaga kekompakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang telah mereka lakukan untuk memajukan desanya. Terakhir, selalu hindari dengan adanya fenomena penunggang gratis atau *free rider* karena fenomena tersebut adalah hal negatif yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi di partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Karangrejo.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, *Groupthink*, *Free Rider*

## ABSTRACT

*Community participation is a key component and indicator of policy success. Community involvement in a program is a necessity that begins with a planning process to implementation in the field. Various problems of community participation are often encountered during the ongoing process. Thus this study discusses the dynamics of community participation in development in Karangrejo Tourism Village. This study aims to analyze and explain the dynamics of community participation in development in Karangrejo Tourism Village. Indicators of community participation problems such as groupthink and free riders.*

*This study uses qualitative methods with descriptive analysis. Data collection uses structured interview techniques and documentation techniques. As supporting data, in this study using literature studies. The data analysis includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*There are results that community participation in development in the Karangrejo Tourism Village is quite good. This was shown by the community attending meetings held by the village and the obstacles that became obstacles in planning and implementing several training programs and village development. In groupthink problems it has been carried out by involving the community and working with the community in decision making. In addition, free riders do not have these problems that occur in community participation.*

*In this study, the village head and his staff maintained good relations with community leaders and the surrounding community. In addition, the community continues to maintain the cohesiveness of community participation in village development which they have done to advance their village. Finally, always avoid the phenomenon of free riders or free riders because this phenomenon is a negative thing that cannot be done by anyone, especially in community participation in the development of Karangrejo Tourism Village.*

*Keywords: Community Participation, Groupthink, Free Rider*

## **PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor keunggulan dari berbagai negara dalam meningkatkan suatu pendapatannya diluar dari kata migas dan pajak. Negara Indonesia sebagai negara berkembang sudah mulai gencar dalam konteks promosi wisata negaranya untuk menarik perhatian wisatawan negara luar jika negara Indonesia memiliki wisata yang terkenal dan eksotis sehingga cocok untuk didatangi dari wisatawan lokal maupun Internasional.

Pada sektor pariwisata merupakan sebuah susunan organisasi, baik publik maupun swasta, yang terlibat dalam produksi, pengembangan, maupun pemasaran produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan (Rani, 2014). Pariwisata merupakan salah satu fenomena globalisasi yang identik dengan persaingan. Hal ini juga karena perkembangan teknologi dan informasi yang tidak terbendung yang membuat perjalanan

menjadi lebih mudah, murah, nyaman, dan cepat bagi kalangan masyarakat. Persaingan yang ketat juga karena setiap negara mengembangkan pariwisata sebagai strategi untuk meningkatkan ekonomi, menjaga lingkungan, dan nilai sosial budaya masyarakat (Sudiarta, I. N., Suardana, I. W., & Ariana, 2014).

Salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki ragam destinasi wisata adalah Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah memiliki letak yang strategis yakni di tengah Pulau Jawa. Saat ini di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki desa wisata sekitar 641 desa wisata pada tahun 2021 yang telah berkembang di berbagai kota dan kabupaten lainnya. Salah satunya yang tersebar yaitu di daerah Kabupaten Magelang yang mempunyai 367 desa. Dengan banyaknya desa yang ada menandakan bahwa Kabupaten Magelang memiliki wilayah yang luas dan masih terdapat banyak area perdesaan. Jumlah desa tersebut mempunyai

ciri khas masing-masing dan karakteristik yang dimiliki di setiap desa.

Desa Wisata Karangrejo salah satu desa wisata yang berada di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Desa tersebut sebagai kawasan desa wisata dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada serta menata tempat agar menjadi tempat wisata yang digemari oleh wisatawan. Desa Wisata Karangrejo memiliki berbagai potensi daya tarik wisata, baik wisata budaya, wisata edukasi, wisata alam, wisata buatan, serta wisata lainnya yang berbeda dengan ciri khas masing-masing.

Usaha dalam pembangunan Desa Wisata Karangrejo salah satunya yaitu dengan adanya partisipasi dari masyarakat Kelurahan Karangrejo sendiri. Menurut Sastrodipoetro (dalam Ainur Rohman, 2009:45) menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab

terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Desa Wisata Karangrejo, tidak semua warga ikut berpartisipasi didalamnya, sebagian besar warga berusia dewasa yang berpartisipasi sedangkan remaja hanya beberapa saja yang ikut berpartisipasi. Seperti beberapa kegiatan dalam Pelatihan Desa berkaitan dengan partisipasi warga dirasa masih rendah yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini mayoritas warga usia dewasa saja hanya sedikit para remaja yang terlibat didalamnya. Dalam pembangunan Desa Wisata Karangrejo, masyarakat dirasa belum optimal dalam berpartisipasi khususnya pada pemberdayaan menggali potensi Desa Wisata Karangrejo.

Dalam partisipasi masyarakat merupakan komponen kunci dan indikator keberhasilan kebijakan. Studi Kogaya dkk (2015) menyatakan bahwa konsep pembangunan melalui pendekatan partisipasi

masyarakat dapat menawarkan beberapa keunggulan. Salah satunya adalah pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat hanya bertindak sebagai fasilitator dan inisiatif berasal dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2 tentang Kepariwisata, setiap orang atau masyarakat disekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja maupun buruh dalam pengelolaannya.

Dalam suatu permasalahan partisipasi masyarakat terdapat segelintir masyarakat yang masih belum peka pada sekitarnya yang saat ini desanya sudah dianugerahkan menjadi desa wisata. Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam beberapa progam pembangunan desa wisata juga bisa mengakibatkan pelaksanaan hambatan dalam keberjalanannya dengan secara optimal.

Sebagai permasalahan partisipasi masyarakat salah satunya yaitu *groupthink* (pengambilan keputusan) dan *free rider* (penunggang gratis). Permasalahan tersebut tanpa disadari beberapa masyarakat bahwa mereka melakukannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan benar-benar berakhir pada tahap perencanaan. Pada titik ini, banyak langkah terkait kerentanan tidak dilakukan dengan benar. Misalnya, dalam partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat sangat lemah dan hasil berbagai forum koordinasi di tingkat bawah terkadang diabaikan oleh pemerintah di atasnya. Pada akhirnya, peneliti berhipotesis bahwa transformasi dari desa biasa menjadi sebuah desa wisata akan memiliki efek ekonomi dan sosial budaya. Selanjutnya, perlu kita ketahui partisipasi masyarakat pada dalam pembangunan yang ada di Desa Wisata Karangrejo apakah terdapat sebuah permasalahan partisipasi yang cenderung

masih ada di tengah-tengah masyarakat tersebut. Sehingga, diperlukan adanya analisis dalam partisipasi masyarakat pada pembangunan dalam di Desa Wisata Karangrejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang secara kajian kritis.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif.

Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di Pemerintah Desa Karangrejo sebagai salah satu desa wisata yang menarik dan unggul pada keunikan pariwisata serta potensi desa yang lainnya serta mendapatkan penguat data serta Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Magelang yang mengurus dalam pariwisata.

Subjek pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Wisata Karangrejo, Pemerintah Desa Karangrejo, serta Dinas

Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga.

Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil, wawancara dan dokumentasi. Untuk data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi berdasarkan Perspektif Perangkat Desa**

Dalam proses perencanaan pembangunan sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan merupakan sebuah langkah dalam menentukan masa depan yang tepat dengan beberapa serangkaian keputusan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Dalam proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Wisata Karangrejo dimulai dari tahap

(*bottom-up*) yang dimana tahap tersebut berawal dari paling bawah yaitu dilakukannya Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun). Selanjutnya, setelah kesepakatan bersama pada saat Musrenbangdes dilakukan maka akan dibawa atau dibahas pada tahap Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) dengan dipimpin oleh Kepala Desa maupun tokoh masyarakat setempat. Dalam Musrenbangdes tersebut memiliki tujuan untuk memprioritaskan program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat serta menyesuaikan dengan alam sekitarnya. Pada saat Musrenbangdes tidak semua hadir namun hanya dihadiri seperti Pemerintah Desa Karangrejo, Kepala Dusun, BPD (Badan Pengawas Desa), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), tokoh masyarakat, serta masyarakat yang aktif dalam pariwisata. Alasan tidak menghadirkan semua elemen masyarakat

adalah hasil dari Musrenbangdes bakal disampaikan pada rapat atau pertemuan di tiap dusun masing-masing yang nantinya hasil tersebut bisa didengar oleh masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah desa dalam mendukung pencapaian suatu program pembangunan desa dengan adanya memberikan dukungan seperti dana desa. Dalam pemerintah desa menggunakan dana desa tersebut agar melengkapi berdasarkan kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam anggaran dana desa sudah tersusun dengan tujuannya. Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maka dana desa yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dikirim melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten yang digunakan untuk penyelenggaraan dalam pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, maupun kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah desa melakukan komunikasi

dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten, jika terdapat keinginan masyarakat yang belum terpenuhi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pemerintah Desa Karangrejo memang memegang tanggung jawab dan memberikan dukungan terhadap masyarakatnya. Rasa tanggung jawab keberhasilan pembangunan Desa Wisata Karangrejo tidak hanya terletak pada perangkat desa dan beberapa lembaga lainnya yang terlibat dalam pembangunan desa, tetapi juga pada masyarakat desa yang terlibat dalam keberhasilan setiap program pembangunan desanya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo tentunya terdapat dorongan dari luar. Pada kenyataannya, masyarakat di Desa Wisata Karangrejo didorong dari pemerintah desa, Pokdarwis, BUMDes, BPD, tokoh masyarakat, maupun Disparpora agar turut aktif partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Pelaksanaan yang sudah dilakukan

pemerintah desa menilai masyarakat kini sudah bagus dan berani terjun ke pariwisata dengan modal keberanian yang mereka miliki dan pendampingan yang sudah dilakukan dari berbagai pihak. Pemerintah desa juga melakukan pemantauan atau pendampingan kepada masyarakat dalam pelaksanaan agar berjalan dengan sesuai tujuan dan kontribusi langsung ke lapangan. Tidak hanya pendampingan dari pemerintah desa saja, kehadiran *stackholder* yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang juga sangat antusias sekali dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Wisata Karangrejo. Namun, Disparpora Kabupaten Magelang hanya melakukan pengawasan maupun pendampingan tidak memberikan alokasi dana khusus untuk Desa Wisata Karangrejo karena tupoksi kerja mereka seperti itu.

Dalam evaluasi pembangunan desa ini terdapat adanya suatu sarana untuk



menyampaikan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat. Sarana dalam menyampaikan kontrol tersebut bertujuan untuk mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, menikmati hasil, serta evaluasi dalam pembangunan desa. Mengenai permasalahan SDM yang saat ini masih menjadi salah satu dari beberapa alasan hambatan dalam partisipasi masyarakat di Desa Wisata Karangrejo. Masyarakat masih yang mengikuti keterlibatan hanya seadanya ataupun yang ingin saja. Hambatan tersebut sudah menjadi hal yang sudah terbiasa pada partisipasi masyarakat. Masyarakat terdapat yang masih belum paham tentang dunia pariwisata yang menjadi ciri khas desanya karena masyarakat tersebut tidak ingin tahu mendalam.

Namun, beberapa masyarakat masih acuh tak acuh serta masyarakat masih pada kesibukan masing-masing yang tak bisa diganggu. Sehingga, hambatan SDM masih

ditemukan dalam partisipasi masyarakat di Desa Wisata Karangrejo.

### **Partisipasi berdasarkan Perspektif Masyarakat**

Keterlibatan masyarakat sebagai salah satu faktor utama dalam keberhasilan sebuah program pembangunan di masyarakat desa. Hal ini sependapat dengan Davis (dalam Tangkilisan, 2005:32) bahwa dalam keterlibatan masyarakat sebuah peristiwa psikologis yang akan melibatkan emosional serta mental. Jika tanpa sebuah partisipasi masyarakat dalam suatu kegiatan, maka pembangunan desa tidak tercapai dengan tujuan semestinya.

Masyarakat terlibat dalam perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangrejo. Keterlibatan masyarakat sangat diutamakan bagi partisipasi untuk melakukan perencanaan suatu program. Sehingga, dalam melibatkan masyarakat bisa mengetahui apa yang benar-benar diperlukan dan mampu mendefinisikan serta merumuskan suatu

program yang akan dilaksanakan berdasarkan permasalahan yang ada di Desa Wisata Karangrejo. Bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan hadir dalam pertemuan maupun rapat Musrenbangdus. Masyarakat berkumpul untuk menyampaikan gagasan maupun ide-ide kepada kepala dusun masing-masing. Sehingga, perencanaan tersebut benar-benar dari *bottom-up* yang dilakukan oleh masyarakat. Adanya ide-ide yang dilakukan oleh masyarakat menjadikan cara berpikir masyarakat kritis untuk menciptakan inovasi-inovasi tertentu dalam pembangunan desa. Selain itu, masyarakat juga berpikir untuk ide yang menarik dalam membuat sebuah program maupun pelatihan pembangunan desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Wisata Karangrejo beberapa masyarakat sangat aktif dalam secara keseluruhan warganya dengan berbagai bidang yang mereka bisa tanpa mengenal

usia. Sisanya yang tidak aktif seperti umur yang sudah tua, masyarakat yang sibuk, serta memang beberapa masyarakat belum mengetahui dalam dunia pariwisata. Masyarakat tersebut ingin keterlibatan itu bisa merasakan langsung dengan membantu tiap program yang dilakukan oleh desa. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat yang masih kurang keaktifannya dalam dunia pariwisata. Perlu sosialisasi terlebih dahulu dari pihak Pokdarwis dengan memberi tahu manfaat program-program yang dilakukan.

Berbicara dalam pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pelaku wisata juga memberikan efek kepada Desa Wisata Karangrejo. Semua pelaku wisata saling berlomba-lomba dalam pelaksanaan pembangunan agar tempat wisata atau pelaku UMKM semakin lebih baik. Seperti halnya yang dilakukan pelaku wisata Gubug Kopi yang melakukan daya tarik wisata dengan edukasi dan inovatif dalam pariwisata yaitu dengan

memperkenalkan yang gula jawa yang asli Desa Karangrejo bukan memperkenalkan tentang dunia kopi.

Pelaku wisata yang lainnya seperti Batik Setumbu melakukan pelaksanaan pembangunan yang belum ada di sekitaran Borobudur. Batik Setumbu hadir di Desa Wisata Karangrejo atas jerih payah untuk melakukan hal yang beda dan semua belum memilikinya. Pemilik Batik Setumbu dengan segala niat dan keyakinan tulus melakukan belajar diluar kota ataupun melakukan beberapa pelatihan dalam hal dunia belajar membuat batik. Dengan ilmu yang sudah dapat maka pemilik Batik Setumbu melakukan pembuatan batik dengan ciri khas yaitu destinasi wisata Punthuk Setumbu yang berada di Dusun Kurahan. Mereka membuat dengan pesona alam dari puncak Punthuk Setumbu dengan pemandangan Candi Borobudur pada saat *sunrise*.

Tidak semua masyarakat Desa Wisata Karangrejo memiliki kesadaran untuk ikut

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Mayoritas besar sudah sadar dan aktif dalam partisipasi masyarakat pada beberapa program pembangunan desa namun sisanya acuh tak acuh. Sisanya tersebut beberapa dari Dusun Kretek II yang mayoritas masyarakatnya adalah pedagang. Hal tersebut para pedagang tidak memikirkan untuk aktif dalam partisipasi masyarakat. Beberapa juga yang terkesan tidak mau terlibat karena pasti ada yang menanganinya. Sehingga, orang-orang yang tidak terlibat partisipasi masyarakat hanya mengetahui kondisi fisik saja setelah beberapa pembangunan sudah jadi atau beberapa program sudah terlaksana.

Berbagai respon atau komentar dari masyarakat bermula dari suatu perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan maupun program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah desa maupun pelaku pariwisata. Dalam suatu program tersebut pasti terjadi adanya respon atau komentar yang beragam

dari masyarakat mulai dari hal positif maupun negatif. Seperti respon negatif yaitu hanya membuang waktu, uang, tenaga, dan lain-lain.

Selain itu, respon atau komentar dari masyarakat maupun dari pelaku pariwisata sangat positif. Adanya suatu program pelatihan dan program pembangunan bisa merubah nasib mereka menjadi hal yang baik. Dampak yang diberikan sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat sekitarnya. Mereka mengikuti suatu program pelatihan maka bisa mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dari materi yang sudah diberikan dan bisa dipraktikkan langsung di lapangan pekerjaan. Dampak positif yang dirasakan sangat beragam seperti pendapatan bertambah, perekonomian naik, terciptanya pekerjaan, pengetahuan pariwisata, infrastruktur yang telah dibuat, dan lain-lain yang mempengaruhi kehidupannya.

## **Berbagai Masalah dalam Praktik Partisipasi Masyarakat**

Mengenai permasalahan praktik partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sebuah perubahan yang dimiliki oleh masyarakat secara dinamis karena terdapat suatu dorongan dari tenaga yang dimilikinya. Masyarakat tentunya mengikuti seluruh program pembangunan desa yang telah disepakati sejak dari perencanaan. Selain itu, masyarakat selalu bersinergi dengan pemerintah desa maupun *stackholder* lainnya yang bekerja sama dengan desa dalam melakukan perkembangan inovasi suatu program pembangunan desa. Namun, tidak disadari langsung oleh masyarakat dan pemerintah desa maka biasanya terjadi dalam suatu permasalahan.

### **1. *Groupthink***

Kemandirian masyarakat luas dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengelolaan lingkungan hidup, permukiman dan

prasarana wilayah, sektor penting sektor informal, sosial budaya dan pendidikan, atau sebagai bagian integral dari pembangunan wilayah dari program pembangunan nasional Indonesia (Sulistiyani, 2004:19).

Pada tahap pengambilan keputusan di Desa Wisata Karangrejo yaitu dengan diselenggarakannya rapat desa setiap Musrenbangdus maupun Musrenbangdes pada saat sebelum merencanakan suatu pembangunan desa dilakukan. Berbagai permasalahan yang ada maupun rencana dari pemerintah desa dibahas dalam rapat-rapat tersebut termasuk juga membahas permasalahan pembangunan yang ada di Desa Wisata Karangrejo. Dalam pengambilan keputusan pada pembangunan desa terlihat masyarakat mengikuti suatu

pertemuan dengan musyawarah secara bersama-sama. Namun, terdapat masyarakat mengikuti pertemuan tersebut hanya ikut-ikutan dan tidak memberikan kontribusi penuh dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut disadari oleh pemerintah desa karena masyarakat tersebut tidak melakukan hal kegiatan apapun.

Selain itu, dalam pertemuan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa dihadiri seperti kepala desa, kepala dusun, perwakilan masyarakat, serta pengelola pariwisata di Desa Wisata Karangrejo juga terlibat sebagai pemimpin dalam agenda tersebut. Hal tersebut, masyarakat agar bisa melihat secara bersama dalam keputusan agar tidak ada pro dan kontra. Pada kenyataannya, pengambilan keputusan diambil oleh

tokoh masyarakat ataupun kepala desa yang sudah berpengalaman, pengaruh sosialnya terhadap masyarakat sekitar, dan kepercayaan dari masyarakat di desanya. Sehingga, masyarakat biasa hanya bisa melihat dan tidak terlibat dalam suatu keputusan yang diambil.

Dalam pengambilan keputusan yang diadakan oleh Pemerintah Desa Karangrejo sudah bersifat objektif dan tidak ada tekanan siapapun. Hal tersebut bisa dilihat dalam pertemuan rapat yang dilakukan seluruhnya melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Selain itu, tidak terdapat adanya pihak lain yang ikut serta dalam hal keputusan yang sudah disepakati secara bersama. Jika, belum mencapai kesepakatan maka dilanjutkan pertemuan rapat selanjutnya. Keputusan tersebut dilakukan untuk kepentingan

bersama dalam memajukan pembangunan di Desa Wisata Karangrejo. Selain itu, keputusan secara logis maupun rasional yang dihasilkan dari pengambilan keputusan tersebut lebih bersifat objektif, transparan, logis, maupun konsisten.

## 2. *Free Rider*

Penunggang gratis atau yang disebut free rider ini bisa ditemui dalam beberapa agenda suatu yang sifatnya berkelompok. Dalam penunggang gratis ini biasanya dilakukan dalam jumlah sekitar 1 atau 2 orang bahkan lebih. Orang yang melakukan penunggang gratis tersebut yang untuk memaksimalkan keuntungan, meminimalkan biaya (pengeluaran), tidak melaksanakan suatu tugasnya, dan menerima hasil yang sama dengan orang yang melakukan suatu tugasnya. Sehingga,

mereka yang melakukan fenomena tersebut adalah orang-orang yang tidak amanah saat diberikan tugas di suatu kelompoknya. Dalam kelompok pun semua bisa terjadi tidak hanya kelompok disaat masih pelajar, kantor, dan yang lainnya. Namun, kelompok tersebut bisa terjadi pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang kelompoknya mencakup banyak orang.

Dalam terlaksananya pembangunan di Desa Wisata Karangrejo mengenai penunggang gratis atau free rider pada realitanya tidak ditemukan dan tidak terjadi pada suatu fenomena penunggang gratis tersebut dalam partisipasi masyarakat. Dalam masyarakat tersebut melakukan suatu tugas dalam kelompok partisipasi dengan benar dan amanah untuk

menjalankannya. Tindakan tersebut memang sangat merugikan bagi diri sendiri serta orang lain. Sehingga, masyarakat bisa mengetahui serta melakukan tugasnya dengan lancar dan saling berkomunikasi satu dengan yang lain dalam kelompok partisipasi masyarakat tersebut agar tidak terjadinya penunggang gratis atau free rider tersebut muncul dalam pembangunan di Desa Wisata Karangrejo.

Mengenai solusi yang tepat jika terjadinya penunggang gratis atau *free rider* partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu dengan berbagai cara untuk melakukannya. Beberapa solusi yang bisa dilakukan seperti berikut ini:

- a. Lebih nyari orang yang berpotensi agar pembagian tugas merata.
- b. Diingatkan atau ditegur.

- c. Tidak diperbolehkan ikut kembali atau dikeluarkan dari kelompok partisipasi.

### **Refleksi Hasil Temuan Penelitian**

Jika, dilihat dari studi partisipasi diatas dalam membahas pernyataan hasil penelitian. Maka, pada kenyataannya di Desa Wisata Karangrejo mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sudah dibidang maju dalam keterlibatan. Alasannya adalah masyarakat sudah sadar maupun aktif untuk melaksanakan beberapa program yang dilakukan dari Desa Wisata Karangrejo. Pemerintah desa juga mewadahi segalanya untuk masyarakat dalam kepentingan memajukan desanya khususnya di bidang pariwisata yang paling menonjol. Masyarakat dan pemerintah desa saling sinergitas dalam komunikasi mereka untuk melakukan partisipasi masyarakat. Dalam partisipasi masyarakat yang dilakukan semuanya saling terlibat sesuai bidang masing-masing. Sehingga, masyarakat juga bisa

melaksanakan pengalaman mereka untuk terjun dalam pariwisata apalagi di desanya. Semua pengambilan keputusan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik untuk membuahkan hasil yang disepakati secara musyawarah. Selain itu, partisipasi masyarakat di Desa Wisata Karangrejo tidak terdapat adanya fenomena penunggang gratis atau *free rider*, karena masyarakat dalam partisipasi saling kompak satu sama yang lainnya dan masyarakat mengetahui fenomena tersebut sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, masyarakat tidak terpengaruhi oleh orang lain untuk melakukan berbagai permasalahan partisipasi masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, maka kesimpulan yang relevan dari hasil penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat adalah :

1. Dalam perspektif perangkat desa yaitu perencanaan pembangunan di Desa



Wisata Karangrejo mulai dari tahap *bottom-up* yaitu dari paling bawah yaitu Musrenbangdus. Selanjutnya, akan dibawa atau dibahas pada tahap Musrenbangdes dengan dipimpin oleh Kepala Desa maupun tokoh masyarakat setempat. Pada saat Musrenbangdes masyarakat tidak semua hadir hanya beberapa masyarakat seperti pemerintah desa maupun pengelola pariwisata. Biaya pembangunan desa sudah dianggarkan dari APBDes maupun pemberian pembangunan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Terdapat beberapa kendala yang menghambat perencanaan dan pelaksanaan beberapa program pelatihan maupun pembangunan desa.

2. Dalam perspektif masyarakat yaitu dalam perencanaan masyarakat mayoritas cukup aktif keterlibatannya dan kesadarannya. Hal tersebut, bisa dilihat masyarakat mengikuti pertemuan

yang dilakukan oleh desa serta kendala yang menjadi hambatan dalam perencanaan dan pelaksanaan beberapa program pelatihan maupun pembangunan desa. Para pelaku pariwisata melakukan kegiatannya atau pelaksanaannya hasil dari suatu perencanaan yang sudah dibuat. Keterlibatan masyarakat dalam mengikuti suatu program mayoritas besar sudah aktif dan kecil yang masih belum aktif. Sehingga, keseluruhan tingkat partisipasi masyarakatnya yaitu tinggi.

3. Respon masyarakat sangat beragam dalam suatu program pemberdayaan pariwisata di Desa Wisata Karangrejo. Terdapat sedikit respon masyarakat yang mengatakan partisipasi dalam suatu program hanya membuang waktu, uang, tenaga, dan lain-lain. Namun, mayoritas besar masyarakat mengatakan sangat positif dalam program-program tersebut.

4. Dalam pengambilan keputusan pembangunan di Desa Wisata Karangrejo sudah dilakukan dengan melibatkan masyarakat serta bekerjasama dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan sampai terciptanya kata mufakat yang dipimpin oleh kepala desa. Masyarakat dan pemerintah desa saling sinergitas dalam partisipasi masyarakat. Sehingga, partisipasi masyarakat bisa dilakukan secara bersama-sama.
5. Dalam penunggang gratis pembangunan di Desa Wisata Karangrejo tidak terdapat masyarakat yang melakukan penunggang gratis atau *free rider*.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang bisa diajukan adalah :

1. Pemerintah desa harus dapat memotivasi masyarakat dengan memberi tahu mereka bahwa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat melalui

program pembangunan akan sangat mendukung keberhasilan program tersebut.

2. Pemerintah desa harus mempertahankan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi pembangunan, sehingga masyarakat merasa lebih puas.
3. Hasil dari pembangunan desa yang dicapai harus dirawat dan dilestarikan sebaik mungkin oleh masyarakat maupun perawatan pembangunan desa juga.
4. Tetap mempertahankan hubungan yang baik masyarakat dengan pemerintah desa agar pengambilan keputusan tidak terdapat *groupthink*.
5. Selalu hindari dengan adanya fenomena penunggang gratis atau *free rider* karena fenomena tersebut adalah hal negatif yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun apalagi di partisipasi

masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Karangrejo.

6. Diharapkan masyarakat dan pemerintah desa untuk menjaga keramahan mereka untuk mendampingi mahasiswa yang sedang penelitian di Desa Wisata Karangrejo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, Farhan (2018) *ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA WISATA CANDIREJO KECAMATAN BOROBUDUR KABUPATEN MAGELANG*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Arimbi, Mas, Achmad. 1993. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Kogoya, T. dkk. 2015. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 2 – Juni 2015
- Muhiddin, A. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah (Perda). *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1)
- Oktafiarni, Z. N. (2022). Komunikasi Pemberdayaan Pemerintah Desa Wisata Karangrejo Borobudur Magelang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Rani, D. P. M. (2014). Pengembangan potensi pariwisata kabupaten sumenep, madura, jawa timur (studi kasus: pantai lombang). *Jurnal Politik Muda*, 3(3), 412-421.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumni
- Sudiarta, I. N., Suardana, I. W., & Ariana, N. (2014). *Persaingan Daya Tarik Pariwisata Bali Suatu Kajian Konseptual Dan Empiris*. *Jurnal Perhotelan dan Pariwisata*. 4(1), 1–13.
- Sulistiyorini, N. R., Darwis, R. S., & Gutama, A. S. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug. *SHARE: Social Work Journal*, 5(1).
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta: PT. Grasindo

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  
Tentang Kepariwisata

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004  
Tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional

Peraturan Menteri Pariwisata Republik  
Indonesia Nomor 29 Tahun 2015  
tentang Rencana Strategis Kementerian  
Pariwisata Tahun 2015-2019